

Strategi Konfrontatif NATO Terhadap Rusia di Negara-Negara Baltik dan Polandia

Hafid Adim Pradana

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang
adimhafid@umm.ac.id

Ruli Inayah Ramadhon

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang

Abstrak — Secara historis, hubungan antara *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) dan Rusia senantiasa bersifat konfliktual. Sekalipun demikian, baik Rusia maupun NATO pernah melakukan perencanaan kerjasama pengelolaan sistem pertahanan rudal di Eropa Timur pada tahun 2010, dimana hal itu sempat memunculkan optimisme akan membaiknya hubungan kedua pihak di masa mendatang. Akan tetapi optimisme tersebut mendadak pudar ketika tahun 2015 Rusia memperbarui *Russia's National Security Strategies* (RNSS). Tindakan Rusia tersebut segera direspon oleh NATO dengan menerapkan strategi konfrontatif dalam bentuk penempatan pasukan militer di Estonia, Latvia, Lithuania dan juga Polandia. Hal ini tentunya akan berisiko menimbulkan konflik militer langsung antara Rusia dan NATO. Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor yang melatarbelakangi NATO dalam menerapkan strategi konfrontatif terhadap Rusia di negara-negara Baltik dan juga Polandia. Dengan menggunakan teori strategi kebijakan luar negeri sebagai kerangka analisis, tulisan ini menghasilkan temuan bahwa strategi konfrontatif yang dijalankan NATO didasari oleh adanya persepsi ancaman dan superioritas kapabilitas militer NATO terhadap Rusia.

Kata Kunci — NATO, Negara-Negara Baltik, Polandia, Rusia, Strategi Konfrontatif.

I. PENDAHULUAN

Pasca berakhirnya Perang Dingin, isu perluasan *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) ke wilayah Eropa Timur menjadi tema pokok dalam perdebatan kaum realis. Secara umum terdapat dua pendapat yang saling bertentangan dalam melihat isu perluasan NATO ke Eropa Timur. Pihak pendukung perluasan NATO ke Eropa Timur memandang bahwa tujuan utama perluasan wilayah keanggotaan NATO ialah bertujuan untuk menciptakan keamanan yang lebih besar. Pendapat tersebut didasarkan atas pernyataan bahwa tindakan perluasan wilayah keanggotaan NATO ke Eropa Timur akan mencegah Rusia untuk menjalankan revisionisme wilayah guna memperoleh kembali wilayah yang lepas atau mengintimidasi negara-negara tetangganya. Adapun para penentang perluasan NATO ke Eropa Timur melihat bahwa upaya tersebut berpotensi menimbulkan konflik langsung dengan Rusia (Jackson & Sorensen, 2005).

Dari kedua perdebatan diatas, secara umum dapat dilihat bahwa negara-negara NATO memandang Rusia sebagai ancaman keamanan kawasan, begitu pula sebaliknya. Dalam sejarahnya, hubungan antara NATO dan Rusia senantiasa bersifat konfliktual (Jackson & Sorensen, 2005). Hubungan konfliktual antar kedua pihak dapat dilacak pada masa Perang Dingin, ketika NATO didirikan

oleh Amerika Serikat sebagai bagian dari strategi keamanan AS untuk membendung pengaruh dari Uni Soviet. Hal ini kemudian direspon Uni Soviet dengan membentuk Pakta Warsawa bersama dengan negara-negara Eropa Timur seperti Polandia, Ceko, Slovakia, hingga Albania (Fachrudji, 2005).

Pasca berakhirnya Perang Dingin, relasi konfliktual antara NATO dan Rusia masih tetap terjaga dan justru tampak semakin meruncing manakala kedua pihak terlibat dalam konflik separatisme di Georgia tahun 2009. Dalam konflik tersebut, negara-negara anggota NATO, khususnya Amerika Serikat (AS) berada di pihak Georgia dan memberikan bantuan terhadap negara tersebut dalam mempertahankan keutuhan wilayahnya. Sedangkan Rusia mendukung penuh kemerdekaan wilayah Ossetia Selatan melalui pemberian dukungan serta pengakuan diplomatik (Bugayova, 2019).

Dengan mengacu pada sejarah hubungan NATO dan Rusia yang senantiasa bertentangan satu sama lain, maka sangat lazim jika hingga saat ini kedua pihak senantiasa berbeda pandangan dan sangat sulit untuk dipersatukan. Sekalipun demikian, kedua pihak pernah terlibat dalam relasi kooperatif, sebagaimana terlihat dari adanya perencanaan kerjasama pengelolaan sistem pertahanan rudal di Eropa Timur pada tahun 2010. Perencanaan kerjasama tersebut didasari oleh adanya kesadaran Rusia dan NATO akan adanya ancaman bersama (Pradana, 2017), dimana hal ini sempat memunculkan optimisme akan munculnya kondisi ketiadaan manuver militer dari kedua pihak di masa mendatang. Akan tetapi optimisme tersebut mendadak pudar ketika tahun 2015 Rusia menetapkan *Russia National Security Strategies* (RNSS) yang secara umum menunjukkan pandangan serta berbagai rencana aksi Rusia terhadap ekspansi keanggotaan yang dilakukan oleh NATO. Dalam RNSS, Rusia juga berencana untuk meningkatkan kekuatan militernya, khususnya rudal balistik baik non-nuklir dan nuklir (RNSS, 2015).

Penetapan RNSS yang dilakukan oleh Rusia tentunya membuat NATO khawatir (Wolff, 2015; Havlicek, 2016). Apalagi pada tahun 2016 Rusia melakukan latihan militer

besar-besaran di Kaliningrad yang menimbulkan kecemasan bagi negara-negara Baltik dan Polandia. Tindakan Rusia tersebut segera direspon oleh NATO dengan menempatkan pasukan militernya di negara-negara Baltik dan juga Polandia. Apa yang dilakukan oleh NATO memunculkan kemungkinan akan adanya konflik militer langsung dengan Rusia, yang pada gilirannya dapat memicu konflik antar negara dalam skala yang lebih luas. Hal ini tentunya berpotensi merugikan NATO, mengingat semakin besarnya biaya operasi militer yang harus dikeluarkan, jika sampai NATO terlibat dalam konflik militer langsung dan berkepanjangan (Gower, 2018). Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mengapa NATO menerapkan strategi konfrontatif terhadap Rusia melalui penempatan pasukan militer di negara-negara Baltik dan juga Polandia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Menguatnya kembali relasi konfliktual antara NATO dan Rusia pasca pemberlakuan RNSS tahun 2015 memunculkan berbagai argumen yang terdapat pada banyak kajian akademis. Argumen-argumen tersebut mayoritas mendeskripsikan mengenai peningkatan ketegangan antara kedua pihak (Havlicek, 2016; Bugayova, 2019), khususnya dalam upaya memperebutkan pengaruh politik di negara-negara Eropa Timur, seperti Ukraina (Wolff, 2015), Belarusia (Challis, 2020), hingga Armenia dan Azerbaijan (Nasirov, Iskandarov, & Sadiyev, 2017). Selain itu beberapa penelitian terdahulu juga berisi argumen mengenai pengaruh relasi konfliktual antara Rusia dan NATO, baik terhadap stabilitas keamanan di Eropa Timur (Kulesa, 2018) maupun terhadap adanya potensi penggunaan senjata nuklir, dimana hal itu tentunya akan berdampak pada besarnya efek destruktif yang diterima oleh kedua pihak (Gower, 2018). Adanya potensi negatif dari semakin kuatnya relasi konfliktual Rusia dan NATO menjadi dasar dari beberapa riset yang menekankan perlunya NATO maupun Rusia untuk mengikis rasa saling tidak percaya antar kedua pihak (Zyga, 2012; Marten, 2017), yang salah satunya dapat dicapai melalui peningkatan intensitas dialog (Klein &

Major, 2015; Vasileiadis, 2020).

Paparan yang terdapat pada berbagai riset terdahulu menunjukkan adanya keseragaman topik pembahasan yang sama-sama berfokus pada relasi Rusia dan NATO serta pengaruh hubungan antar keduanya terhadap stabilitas politik dan keamanan di kawasan Eropa. Tidak seperti riset-riset terdahulu yang tertulis di atas, penelitian ini berfokus untuk melihat dasar pilihan strategi yang dipilih oleh NATO dalam merespon tindakan Rusia. Guna menjelaskan hal tersebut, penelitian ini akan menggunakan Teori Strategi Kebijakan Luar Negeri yang dirumuskan oleh John P. Lovell (1970).

Dalam pandangan Lovell, pilihan strategi kebijakan luar negeri suatu negara terhadap negara lain ditentukan oleh dua faktor, yaitu persepsi mengenai strategi kebijakan luar negeri atau posisi politis negara lain serta pandangan tentang perbandingan estimasi kapabilitas yang dimiliki dengan kapabilitas negara lain. Dengan mengkombinasikan kedua faktor diatas, maka terdapat empat jenis strategi kebijakan luar negeri yang dapat diterapkan oleh suatu negara. Keempat jenis strategi tersebut meliputi *Leadership Strategy*, *Concordance Strategy*, *Accommodation Strategy*, dan *Confrontation Strategy*.

Gambar 1: PILIHAN STRATEGI KEBIJAKAN LUAR NEGERI

Other's Strategy: Threatening	<i>Confrontation Strategy</i>	<i>Leadership Strategy</i>	Other's Strategy: Supportive
	<i>Accommodation Strategy</i>	<i>Concordance Strategy</i>	
Own Capabilities: Inferior			

Sumber: Lovell, J. P. (1970). *Foreign Policy in Perspective: Strategy, Adaptation, Decision Making*

Leadership Strategy merupakan suatu strategi di mana suatu negara menganggap kapabilitas negaranya lebih tinggi dari negara lain serta menganggap negara lain mendukung tujuan nasionalnya. Jadi dalam strategi ini suatu negara akan banyak menerapkan strategi persuasi serta tawar menawar dengan negara lain. Sementara itu, *Concordance Strategy* ialah suatu strategi

yang diterapkan dimana suatu negara merasa kapabilitas negaranya lebih rendah dari negara lain dan menganggap negara lain sebagai pendukung dari tujuan nasional negaranya. Maka dalam strategi ini terdapat hubungan yang saling menguntungkan dimana negara dengan kapabilitas rendah akan berusaha untuk mengambil kebijakan yang tidak menimbulkan konflik antar negara.

Adapun *Accommodation Strategy* merupakan suatu strategi yang diterapkan suatu negara di mana negara tersebut menganggap kapabilitas negaranya lebih rendah daripada kapabilitas negara lain, serta memiliki anggapan bahwa negara lain tersebut menjadi ancaman bagi negaranya. Maka negara akan menerapkan strategi akomodasi atau penyesuaian-penyesuaian terhadap negara lawan. Hal ini dilakukan untuk menghindari konflik yang dapat merugikan negaranya karena kapabilitas negaranya lebih rendah dari negara lawan. Sedangkan *Confrontation Strategy* ialah strategi yang diterapkan oleh suatu negara di mana negara tersebut memiliki anggapan bahwa kapabilitasnya lebih tinggi daripada negara lain serta adanya persepsi yang melihat negara lain merupakan ancaman bagi tujuan nasional negaranya. Dalam situasi ini negara akan menerapkan tindakan yang dapat menimbulkan konflik serta memaksa negara lain untuk mengakui kapabilitas negaranya. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, tindakan NATO menempatkan pasukan militer di negara-negara Baltik dan Polandia merupakan wujud dari strategi konfrontatif. Berdasarkan paparan teoritis diatas, strategi konfrontatif yang dilakukan NATO dipengaruhi oleh persepsi NATO yang senantiasa menganggap Rusia sebagai ancaman dan anggapan NATO yang senantiasa memandang kapabilitasnya lebih tinggi daripada Rusia.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *causal explanation*, yaitu penelitian yang berusaha untuk menjelaskan penyebab dari fenomena yang diamati (Silalahi, 2009). Dalam metode *causal explanation*, terdapat dua variabel

yang terdiri dari variabel dependen atau unit analisa maupun variabel independen atau unit eksplanasi. Unit analisa ialah fenomena yang hendak dijelaskan atau dianalisa. Sedangkan unit eksplanasi ialah perilaku yang hendak diamati, yang berfungsi untuk menjelaskan fenomena yang dianalisa (Mas'ood, 1990). Sederhananya, unit eksplanasi berfungsi sebagai penjelas dari unit analisa. Dalam penelitian ini strategi konfrontatif NATO dalam bentuk penempatan pasukan militer di Baltik dan Polandia berfungsi sebagai unit analisa. Adapun unit eksplanasi dalam penelitian ini meliputi pandangan NATO mengenai superioritas kapabilitas yang mereka miliki dan persepsi ancaman terhadap Rusia.

Dalam kaitannya dengan pengumpulan data, penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau metode pengumpulan data yang berbasis pada dokumen (Bakry, 2016). Dalam studi kepustakaan, data-data yang berkaitan dengan topik permasalahan yang diangkat akan ditelusuri melalui penelaahan terhadap buku, artikel jurnal, serta berita media cetak dan elektronik. Sedangkan teknik analisa data dalam penelitian ini terdiri dari dua tahap. Pertama, data yang tersebar dari berbagai sumber literatur, dibaca dan ditelaah dengan seksama untuk dijadikan acuan berfikir serta mencari solusi yang tepat, dan pada penelitian lebih lanjut diharapkan menghasilkan hasil data yang valid. Selanjutnya, data yang telah terseleksi, direduksi sehingga tersusun secara sistematis guna memberikan gambaran yang lebih tajam terhadap fenomena yang diteliti.

IV. HASIL DAN ANALISIS

Bagian ini berupaya memaparkan analisa penempatan pasukan militer di Estonia, Latvia, Lithuania, dan Polandia yang dilakukan oleh NATO. Sesuai dengan teori strategi kebijakan luar negeri yang dirumuskan oleh Lovell (1970), tindakan NATO tersebut merupakan wujud dari penerapan strategi konfrontatif terhadap Rusia. Apa yang dilakukan oleh NATO didasari oleh dua faktor, yaitu keberadaan Rusia yang senantiasa dipersepsikan sebagai ancaman, serta anggapan NATO yang melihat bahwa kapabilitasnya lebih tinggi dari Rusia. Guna

mempermudah pembahasan, penulisan pada bagian pembahasan ini akan dibagi dalam tiga sub-bagian yang meliputi paparan tentang penempatan pasukan militer di negara-negara Baltik dan Polandia sebagai strategi konfrontatif NATO, untuk kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai persepsi ancaman dan superioritas kapabilitas NATO terhadap Rusia.

Manuver Militer di Baltik dan Polandia sebagai Strategi Konfrontatif NATO

Keputusan NATO dalam menempatkan pasukan militer di negara-negara Baltik dan Polandia secara resmi ditetapkan pada Warsaw Summit tahun 2016, yang merupakan pertemuan puncak ke-27 para kepala pemerintahan negara-negara anggota NATO. Secara umum Warsaw Summit menghasilkan beberapa keputusan bersama, dimana salah satu yang paling utama ialah penguatan kehadiran militer di Polandia, Estonia, Latvia, dan Lithuania yang dilakukan secara bergilir. Detail rencana NATO dalam menempatkan pasukan militer di keempat negara tersebut tampak pada poin 40 Warsaw Summit 2016 (nato.int, 2016):

"We have decided to establish an enhanced forward presence in Estonia, Latvia, Lithuania and Poland to unambiguously demonstrate, as part of our overall posture, Allies' solidarity, determination, and ability to act by triggering an immediate Allied response to any aggression. Beginning in early 2017, enhanced forward presence will comprise multinational forces provided by framework nations and other contributing Allies on a voluntary, sustainable, and rotational basis. They will be based on four battalion-sized battlegroups that can operate in concert with national forces, present at all times in these countries, underpinned by a viable reinforcement strategy. We welcome the offers of Canada, Germany, the United Kingdom and the United States to serve as framework nations for the robust multinational presence in Latvia, Lithuania, Estonia and Poland respectively. We have also accepted the Polish offer to provide an existing division headquarters as a basis for the establishment of a multinational division

headquarters, pending agreement on the modalities by the Council. We recognise the integral role host nations will play in enhanced forward presence. We further welcome additional contributions from across the Alliance to support this important endeavour. We recognise the significant resource commitments of Allies.”

Pada paparan poin 40 Warsaw Summit diatas, secara umum dapat dilihat bahwa penempatan pasukan militer akan dimulai pada tahun 2017, dimana Polandia akan menjadi lokasi bagi markas utama pasukan militer NATO yang akan diterjunkan ke negara-negara Baltik. Pada praktiknya NATO benar-benar menerapkan apa yang mereka rencanakan tersebut. Hal ini tampak dari beberapa langkah tindak lanjut yang dilakukan oleh NATO yang meliputi pengerahan pasukan militer, latihan militer bersama, peningkatan anggaran belanja militer, hingga pemberian bantuan militer.

Berdasarkan poin 40 Warsaw Summit, disebutkan bahwa Jerman, Inggris, Kanada, dan AS sejak awal telah berkomitmen untuk tidak hanya mengerahkan pasukan militer dalam jumlah besar, tetapi menjadi koordinator di bagi pasukan-pasukan militer negara-negara anggota NATO lainnya. Pada perkembangannya, keempat negara tersebut berbagi tugas untuk mengkoordinir penempatan pasukan militer di salah satu diantara Polandia, dan tiga negara Baltik. Dari pembagian tugas yang telah disepakati, Inggris bertanggung jawab dalam mengkoordinir penempatan pasukan gabungan Bersama dengan Denmark dan Perancis di Estonia. Sedangkan Jerman bertugas mengkoordinir pasukan gabungan di Lithuania bersama pasukan militer dari Belgia, Belanda, Norwegia, Kroasia, Yunani, dan Luksemburg. Sementara itu Kanada bertugas di Latvia, dengan memimpin pasukan gabungan dari Albania, Italia, Polandia, Spanyol dan Slovenia. Adapun AS bertugas memimpin pasukan dari negaranya sendiri di Polandia (Batchelor, 2016).

Pada praktiknya, diantara keempat negara yang bertugas sebagai koordinator pasukan gabungan, Jerman menjadi negara pertama yang menempatkan

personel militernya di Lithuania pada pertengahan Januari 2017. Pasukan yang dikerahkan oleh Jerman terdiri dari 450 personel militer yang disertai dengan 26 tank dan juga 170 kendaraan militer lainnya (Rehle, 2017). Apa yang dilakukan oleh Jerman di Lithuania kemudian disusul oleh Belgia, Belanda, Norwegia, Kroasia, Yunani, dan Luksemburg yang secara total menempatkan 1200 hingga 1500 personel militer (Osborne, 2017). Setelah Jerman, pada bulan yang sama AS menjadi koordinator kedua yang menempatkan 4000 pasukannya di Polandia (Spark, 2017). Selanjutnya Inggris menjadi koordinator ketiga yang tiba di Estonia, yang segera disusul oleh Perancis dan Denmark (The Guardian, 2017). Kanada menjadi koordinator terakhir yang datang ke Lithuania pada Juni 2017 dengan menempatkan 450 pasukan (Tood, 2017).

Selain pengerahan pasukan militer, NATO juga mengadakan latihan militer bersama pasukan dari negara-negara Baltik dan Polandia. Pengadaan Latihan militer ini merupakan salah satu bentuk komitmen NATO dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya perang langsung dengan pihak atau negara yang dianggap sebagai ancaman. Sejak 2017 hingga 2019, intensitas Latihan militer NATO di Latvia, Lithuania, Estonia, dan Polandia senantiasa mengalami peningkatan. Tahun 2017 NATO mengadakan 6 kali latihan militer bersama. Pada tahun tersebut latihan terbesar ialah *Saber Strike Operation*, yang dilaksanakan di Kawasan Baltik dan Polandia. Latihan ini berlangsung dari 6-23 Juni dan diikuti oleh 9.000 pasukan dari berbagai negara NATO (Mayhugh, 2017). Setahun berselang intensitas latihan militer meningkat menjadi 7 kali, dimana lokasi latihan militer bersama tidak hanya sebatas di Polandia, Latvia, Lithuania, dan Estonia, tetapi juga meluas ke Norwegia. Diantara 7 kali penyelenggaraan latihan militer bersama, *Trident Juncture Operation*, yang dilaksanakan pada 25 Oktober hingga 7 November 2018. Latihan yang dilaksanakan di Norwegia, Laut Baltik dan Atlantik Utara ini diikuti oleh negara-negara anggota dan negara partner NATO, dengan melibatkan 50.000 ribu pasukan, 250 pesawat,

65 kapal dan lebih dari 10.000 ribu kendaraan militer (Milner, 2018). Adapun tahun 2019, intensitas latihan militer bersama meningkat menjadi 8 kali, dimana *Spring Storm Operation* yang berlangsung di Estonia pada 29 April hingga 10 Mei 2019 menjadi yang terbesar dengan melibatkan 9.000 pasukan darat dan didukung peralatan tempur canggih baik darat, laut udara (Rogers, 2019).

Berbagai tindakan NATO dalam bentuk penempatan pasukan militer maupun latihan militer bersama, membuat Polandia, Latvia, Lithuania, dan Estonia turut melakukan penyesuaian melalui peningkatan anggaran belanja militer. Dari tahun 2017 hingga 2019, keempat negara anggota NATO tersebut senantiasa meningkatkan jumlah anggaran belanja militer mereka.

Tabel 1: ANGGARAN BELANJA MILITER ESTONIA, LATVIA, LIHUANIA, DAN POLANDIA (DALAM JUTA US DOLLAR)

	2017	2018	2019
Estonia	498	541	615
Latvia	403	485	709
Lithuania	636	818	1056
Polandia	9405	9938	11857

Sumber: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_178975.htm

Berdasarkan tabel 1 diatas, baik Estonia, Latvia, Lithuania, dan Polandia ternyata juga mengalami peningkatan selisih anggaran yang mereka khususkan untuk belanja militer setiap tahunnya. Dengan menghitung selisih jumlah anggaran dari tahun terbaru ke tahun sebelumnya, didapatkan data bahwa Estonia mengalami kenaikan selisih anggaran belanja dari 43 juta US Dollar pada 2017-2018 menjadi 74 juta US Dollar pada 2018-2019. Demikian pula dengan Latvia (dari 82 ke 224), Lithuania (dari 165 ke 238), dan Polandia (dari 533 ke 1919).

Disamping meningkatkan anggaran belanja militer, sebagai negara anggota NATO, Estonia, Latvia, Lihuania, dan Polandia juga mendapatkan bantuan militer dari negara-negara anggota NATO lainnya, khususnya AS. Tercatat setiap tahun sejak 2017, keempat negara yang berlokasi di kawasan Baltik dan Eropa Timur tersebut

memperoleh bantuan sebesar 30 juta US Dollar. Selain itu, terdapat pula bantuan sebesar 1,2 juta US Dollar setiap tahun, yang bertujuan khusus untuk meningkatkan kapabilitas pasukan militer melalui pendidikan dan pelatihan militer. Selain kedua jenis bantuan diatas, NATO juga memberikan fasilitas berupa pengadaan infrastruktur militer dalam bentuk pembangunan pangkalan militer di Polandia yang menghabiskan dana sebesar 260 juta US Dollar, yang bersumber dari kontribusi anggota-anggota NATO (Sprenger, 2019).

Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh NATO di Estonia, Latvia, Lihuania, dan Polandia pasca pemberlakuan RNSS pada 2015 merupakan wujud dari strategi konfrontatif terhadap Rusia. Sebagaimana disampaikan oleh Lovell, strategi konfrontatif yang dilakukan oleh suatu negara merupakan tindakan yang berpotensi memicu konflik langsung dengan negara yang dianggap sebagai pengancam. Hal ini sesuai dengan kondisi yang terjadi selama NATO menjalankan manuver militernya di Estonia, Latvia, Lihuania, dan Polandia, dimana terdapat respon serupa dari Rusia yang salah satunya terlihat dari peningkatan jumlah intensitas pasukan militernya di wilayah Kaliningrad yang berbatasan langsung dengan Polandia dan Lithuania. Selain itu, pada 2018, Rusia juga menempatkan rudal balistik di wilayah yang sama. Dengan melihat pada respon Rusia, tidak menutup kemungkinan bahwa strategi konfrontatif yang dilakukan oleh NATO dapat memicu terjadinya atau perang militer terbuka dengan Rusia. Berangkat dari paparan diatas, pada bagian berikutnya akan dijelaskan mengenai faktor-faktor yang membuat NATO mengambil pilihan strategi konfrontatif.

Persepsi Ancaman NATO terhadap Rusia

Salah satu faktor yang mendasari penerapan strategi konfrontatif oleh suatu pihak ialah adanya anggapan akan ancaman yang dihadirkan oleh pihak atau negara lain. Jika mengacu pada penjelasan tersebut, maka keputusan NATO dalam meningkatkan manuver militer

di negara-negara Baltik dan Polandia didasari oleh adanya persepsi dari NATO yang senantiasa melihat Rusia sebagai ancaman. Anggapan NATO ini tidak bisa dilepaskan dari pembaruan RNSS yang dilakukan oleh Rusia pada 2015. Guna mempermudah pembahasan, bagian ini terlebih dahulu akan menjelaskan tentang RNSS sebagai strategi kebijakan luar negeri Rusia, untuk kemudian dilanjutkan dengan paparan mengenai bagaimana NATO memandang Rusia sebagai ancaman.

RNSS secara umum dapat dipahami sebagai perencanaan strategi dasar yang berisikan kepentingan nasional, prioritas, tujuan dan langkah-langkah yang akan ditetapkan Rusia dengan tujuan memperkuat keamanan nasional dan memastikan terlaksananya pembangunan berkelanjutan. RNSS pertama kali dirilis pada 2009. Secara umum terdapat empat prinsip penting dalam RNSS 2009 yang berisi mengenai pandangan dan rencana Rusia dalam menyikapi dinamika politik internasional dan keberadaan berbagai ancaman eksternal (Oliker, 2016). Pertama, dalam dokumen yang ditandatangani oleh Presiden Dimitri Medvedev tersebut disebutkan bahwa dalam jangka Panjang, Rusia berkeinginan untuk menyaingi AS sebagai negara super power. Hal ini secara jelas terlihat pada salah satu isi dari RNSS 2009 yang berbunyi *"The recurrence of unilateral force in international relations will have a negative impact with regard to implementation of Russia's national interests"*. Bagi Rusia, dominasi AS dalam politik internasional saat ini merupakan ancaman bagi implementasi kepentingan nasional Rusia. Ketiadaan pesaing sepadan yang menjadikan AS sebagai satu-satunya negara super power pada gilirannya membuat AS dapat secara leluasa mengajak negara-negara koalisinya dalam NATO untuk terus melakukan perluasan pengaruh politis, salah satunya ke kawasan Eropa Timur (Oliker, 2016). Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh NATO di Eropa Timur tentunya merupakan salah satu hal yang mengganggu kepentingan Rusia untuk menjadi negara super power, mengingat salah satu upaya terdekat Rusia dalam mewujudkan ambisinya tersebut ialah

memperkuat hegemoni politiknya di Eropa Timur, khususnya di negara-negara bekas Uni Soviet.

Kedua, berkaitan dengan upaya "menguasai Kembali Eropa Timur", RNSS 2009 berfokus pada upaya membangun kerjasama baik dalam bentuk bilateral maupun multilateral dengan negara-negara *Commonwealth of Independent States* (CIS) dan *Shanghai Cooperation Organization* (SCO). Hal ini tampak dari salah satu poin dalam RNSS 2009 yang berbunyi *"the priority of Russia's foreign policy is the development of bilateral and multilateral cooperation with the Commonwealth of Independent States"*. Melalui penguatan kerjasama dengan negara-negara CIS dan SCO, Rusia berharap agar pengaruhnya di Eropa Timur semakin menguat (Oliker, 2016).

Ketiga, Rusia sadar akan pentingnya keberadaan sumber daya alam yang terbatas, yang kedepannya berpotensi memicu konflik antar negara. Oleh karena itu dalam RNSS 2009 disebutkan bahwa *"the attention of international politics in the longterm perspective will focus on the possession of energy resources"*. Dalam jangka panjang Rusia berencana untuk selalu memastikan ketersediaan energi dan sumber daya alam. Berkaitan dengan itu, Rusia akan berfokus pada upaya pemenuhan sumber daya yang berasal dari kawasan Timur Tengah, Lingkar Arktik, Laut Kaspia, hingga Asia Tengah. Sebagai antisipasi akan terjadinya benturan atau konflik langsung dengan negara lain yang memiliki keinginan yang sama, Rusia bersiap untuk terus melakukan modernisasi militer (Oliker, 2016).

Terakhir, sebagai bagian dari upaya modernisasi dan penguatan kapasitas militer, RNSS 2009 untuk *"...transform the structure of the Armed Forces, to retain the capacity of the strategic nuclear forces, to improve the organizational structure of the ground forces, as well as increase the number of troops at permanent readiness"*. Keinginan Rusia untuk memperkuat militernya melalui peningkatan kapasitas senjata nuklir didasari oleh anggapan Rusia yang memandang bahwa nuklir merupakan senjata pencegah terbaik yang mampu membuat negara pengancam berfikir dua kali untuk

melakukan serangan militer secara langsung.

RNSS pada perkembangannya diperbarui oleh pemerintahan Vladimir Putin pada 31 Desember 2015. Secara umum tidak terdapat perbedaan terkait prinsip dasar RNSS 2015 dengan RNSS 2009. Baik RNSS terbaru maupun yang sebelumnya sama-sama berfokus pada rencana strategis Rusia untuk menjadi negara super power, meningkatkan kerjasama bilateral dan multilateral, memperkuat ketahanan energi dan sumber daya alam, serta modernisasi dan penguatan kapabilitas militer. Salah satu pembaruan yang terdapat pada RNSS 2015 ialah perluasan kerjasama bilateral dan multilateral yang tidak hanya sebatas pada negara-negara CIS dan SCO, tetapi juga dengan negara-negara *Collective Security Treaty Organization* (CSTO) dan negara-negara lain di Kawasan Asia, Afrika, maupun Amerika Selatan. Sekalipun demikian, terdapat satu poin penting dalam RNSS 2015 yang tidak terdapat dalam RNSS sebelumnya, yaitu penegasan mengenai keberadaan NATO sebagai ancaman keamanan Rusia (RNSS, 2015). Hal ini dapat dilihat dari poin 15 RNSS 2015 yang berbunyi:

“The buildup of the military potential of the North Atlantic Treaty Organization (NATO) and the endowment of it with global functions pursued in violation of the norms of international law, the galvanization of the bloc countries' military activity, the further expansion of the alliance, and the location of its military infrastructure closer to Russian borders are creating a threat to national security”

Bagi Rusia perluasan keanggotaan yang dilakukan oleh NATO di Eropa Timur, khususnya di negara-negara bekas Uni Soviet, merupakan suatu masalah yang serius. Dengan keberhasilan memasukkan beberapa negara Eropa Timur sebagai anggotanya, NATO tentunya dapat dengan leluasa meningkatkan militernya dan rudal balistik di negara-negara yang berbatasan dekat dengan perbatasan Rusia. Dalam pandangan Rusia apa yang dilakukan oleh NATO merupakan suatu ancaman dan merupakan bentuk pelanggaran terhadap norma internasional, mengingat adanya kekhawatiran akan

potensi konflik terbuka (RNSS, 2015). Berkaitan dengan itu, Rusia juga memasukkan strategi keamanan guna menjaga wilayah perbatasannya, sebagaimana disebutkan dalam RNSS 2015 poin ke-33:

“The strategic national defense goals are to create conditions for the peaceful and dynamic socioeconomic development of the Russian Federation, and to ensure its military security”

Berdasarkan poin 33 RNSS 2015 diatas, disebutkan bahwa keamanan nasional Rusia dapat diwujudkan melalui upaya penciptaan kondisi damai yang disertai dengan pembangunan sosial-ekonomi yang dilindungi oleh keamanan militer. Militer Rusia, dengan demikian mempunyai peran besar dalam menjaga stabilitas keamanan internal dan eksternal. Selain itu guna meningkatkan kapabilitas militernya, Rusia berupaya melakukan modernisasi dan inovasi persenjataan maupun sistem informasi seperti terlihat pada poin 36 RNSS 2015:

“The state's military organization is to be improved through the timely identification of existing and potential military risks and threats, the balanced development of the elements of military organization, increasing defense capability, equipping the Armed Forces of the Russian Federation, other troops, military formations and agencies with modern weapons and military hardware, and the innovation-based development of the Russian Federation's defense industry complex.”

Selain melakukan peningkatan kapabilitas militer, Rusia juga senantiasa bersiap akan risiko terjadinya konflik bersenjata secara langsung. Kesiapan Rusia tersebut mewujud dalam bentuk upaya meningkatkan kapasitas persenjataan nuklir sebagai upaya deterrence atau pencegahan terhadap pihak yang dianggap sebagai pengancam, sebagaimana terdapat pada poin 37 RNSS 2015:

“Strategic deterrence and the prevention of armed conflicts are achieved by maintaining the capacity for nuclear deterrence at a sufficient level, and the Russian Federation Armed Forces, other troops, and military

formations and bodies at the requisite level of combat readiness”

Berbagai paparan yang terdapat pada poin 15, 33, 36, dan 37 RNSS 2015 mengenai penetapan NATO sebagai ancaman beserta rencana peningkatan kualitas militer dan pembaruan persenjataan nuklir, merupakan salah satu alasan yang mendasari NATO dalam memandang Rusia sebagai ancaman. Anggapan NATO ini secara jelas tampak dari adanya pernyataan resmi NATO dalam *Press Release Warsaw Summit* secara resmi dipublikasikan pada 9 Juli 2016. *Press Release Warsaw Summit* sendiri merupakan paparan hasil dari pertemuan rutin ke-27 seluruh kepala pemerintahan yang terdiri dari 139 poin yang membahas mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi NATO dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan (nato.int, 2016). Dari keseluruhan poin dalam *Press Release Warsaw Summit*, sedikitnya terdapat beberapa poin yang membahas tentang potensi ancaman yang dihadirkan oleh Rusia dan rencana NATO dalam merespon tindakan Rusia tersebut. Pemaparan awal mengenai ancaman Rusia tampak pada poin 5 yang menyebutkan bahwa:

“There is an arc of insecurity and instability along NATO’s periphery and beyond. The Alliance faces a range of security challenges and threats that originate both from the east and from the south; from state and non-state actors; from military forces and from terrorist, cyber, or hybrid attacks. Russia’s aggressive actions, including provocative military activities in the periphery of NATO territory and its demonstrated willingness to attain political goals by the threat and use of force, are a source of regional instability, fundamentally challenge the Alliance, have damaged Euro-Atlantic security, and threaten our long-standing goal of a Europe whole, free, and at peace.”

Berdasarkan redaksional poin 5 di atas, dapat dilihat bahwa NATO memandang tindakan agresif Rusia dalam bentuk aktivitas militer yang provokatif di sekitar wilayah NATO sebagai suatu ancaman. Bagi NATO, apa yang dilakukan oleh Rusia merupakan penyebab utama dari instabilitas politik dan keamanan di Eropa. Hal ini

dipertegas oleh NATO melalui pemaparan mengenai tindakan agresif Rusia di beberapa wilayah di Eropa Timur, sebagaimana terlihat pada poin 10 Warsaw Summit yang menyebutkan bahwa:

“Russia’s destabilising actions and policies include: the ongoing illegal and illegitimate annexation of Crimea, which we do not and will not recognise and which we call on Russia to reverse; the violation of sovereign borders by force; the deliberate destabilisation of eastern Ukraine; large-scale snap exercises contrary to the spirit of the Vienna Document, and provocative military activities near NATO borders, including in the Baltic and Black Sea regions and the Eastern Mediterranean; its irresponsible and aggressive nuclear rhetoric, military concept and underlying posture; and its repeated violations of NATO Allied airspace. In addition, Russia’s military intervention, significant military presence and support for the regime in Syria, and its use of its military presence in the Black Sea to project power into the Eastern Mediterranean have posed further risks and challenges for the security of Allies and others.”

Dari apa yang tertulis pada poin 10 di atas, terlihat jelas bagaimana NATO memperkuat pandangannya mengenai ancaman yang dihadirkan oleh Rusia dengan memberikan penekanan pada berbagai tindakan provokatif Rusia dalam bentuk aneksasi wilayah Krimea dan berbagai manuver militer yang dilakukan Rusia di wilayah Baltik, Laut Hitam dan Mediterania Timur. Selain berbagai tindakan agresif Rusia, kekhawatiran NATO terhadap negara yang sering dianggap sebagai pewaris Uni Soviet tersebut juga dilandasi oleh penguatan kapabilitas militer Rusia yang dinilai mengganggu stabilitas keamanan Eropa, sebagaimana terlihat pada poin 23 Warsaw Summit:

“We face evolving challenges in the Baltic and Black Sea regions, the North Atlantic, as well as in the Mediterranean, which are of strategic importance to the Alliance and to our partners. Russia continues to strengthen its military posture, increase its military activities, deploy new high-end capabilities, and

challenge regional security. These developments have resulted in increased unpredictability that could be mitigated through reciprocal transparency and risk reduction measures. Recognising the indivisibility of Allied security, we will continue to closely monitor the situation in these regions. Our response will be tailored to specific circumstances in each region. We will also work with interested partners to enhance our situational awareness and to develop common approaches to evolving challenges."

Selain menekankan anggapan akan potensi ancaman yang dihadirkan Rusia dalam bentuk penguatan postur dan peningkatan aktivitas militer, poin 23 Warsaw Summit juga berisikan tentang rencana tindak lanjut NATO dalam merespon ancaman yang dihadirkan oleh Rusia. Pada akhirnya, rencana tindak lanjut NATO tersebut secara detail tertulis pada poin 40 Warsaw Summit, yang kemudian diikuti dengan tindakan pengerahan pasukan militer, latihan militer bersama, peningkatan anggaran belanja militer, hingga pemberian bantuan militer di Estonia, Latvia, Lithuania, dan Polandia. Adanya paparan tertulis yang terdapat pada poin 5, 10, 23, dan 40 *Press Release Warsaw Summit* sebagaimana tercantum diatas, menunjukkan bahwa NATO menganggap Rusia sebagai negara pengancam stabilitas keamanan di Eropa Timur dan Kawasan Baltik. Persepsi ancaman NATO tersebut kemudian menjadi dasar NATO untuk menerapkan strategi konfrontatif terhadap Rusia melalui berbagai manuver militer di Estonia, Latvia, Lithuania, dan Polandia.

Superioritas Kapabilitas Militer NATO terhadap Rusia

Faktor lain yang mendasari diterapkannya strategi konfrontatif suatu pihak ialah adanya anggapan atau fakta bahwa kapabilitas yang dimiliki oleh pihak tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan pihak atau negara lain yang dianggap sebagai pengancam. Jika mengikuti pemahaman tersebut, maka pilihan strategi konfrontatif NATO terhadap Rusia tidak bisa dilepaskan dari anggapan NATO yang meyakini bahwa kapabilitasnya lebih unggul dibandingkan dengan Rusia. Dalam konteks militer,

terdapat cukup banyak indikator yang dipakai untuk membandingkan kapabilitas dua pihak yang berlawanan. Dalam penelitian ini, indikator yang dipakai untuk melihat perbandingan kapabilitas NATO dan Rusia meliputi jumlah personel militer aktif, jumlah tank, jumlah pesawat tempur, hingga jumlah persenjataan nuklir. Guna mempermudah pembahasan, bagian ini terlebih dahulu akan menjelaskan eksistensi NATO dan Rusia pasca berakhirnya Perang Dingin. Selanjutnya akan dipaparkan mengenai perbandingan kapabilitas NATO dan Rusia yang disertai dengan bukti penguat yang menunjukkan keyakinan NATO akan kemampuannya dalam mengatasi Rusia.

Keberadaan aliansi militer NATO tidak bisa dilepaskan dari Perang Dingin yang melibatkan AS dan Uni Soviet. Selama konflik yang berlangsung sejak kegagalan kesepakatan Postdam pada 1945 tersebut, baik AS maupun Uni Soviet sama-sama berupaya untuk menyebarkan pengaruh ideologis kepada negara-negara lain agar berada di pihak mereka. Sebagai respon atas peningkatan kapabilitas militer dan semakin kuatnya pengaruh politis Uni Soviet di Eropa di sepanjang 1946-1949, tahun 1948, negara-negara Eropa Barat yang terdiri dari Belgia, Inggris, Belanda, Perancis, dan Luxemburg menandatangani Perjanjian Atlantik Utara. Setahun berselang, AS, Kanada, Denmark, Norwegia, Islandia, Italia, dan Portugal bergabung dalam perjanjian tersebut yang kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan *North Atlantic Treaty* pada tanggal 4 April 1949 di Washington, dimana hal itu menjadi awal mula dari kelahiran NATO (Heywood, 2014).

Sebagai aliansi militer antar pemerintah, tujuan utama NATO ialah melindungi kebebasan dan keamanan negara-negara anggotanya melalui sarana politik dan militer. Dengan demikian, NATO memiliki prinsip dasar bahwa serangan terhadap satu atau beberapa anggota akan dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 dari Piagam NATO. Meskipun demikian, pada awal pembentukannya, terutama sejak masuknya AS, NATO memiliki tujuan untuk mencegah ancaman yang dimunculkan oleh Uni Soviet dan

negara-negara satelitnya di Eropa Timur. Berdasarkan tujuan awalnya tersebut, NATO kemudian menjadi suatu institusi yang merekatkan hubungan antara AS dan Eropa Barat. Pada praktiknya AS memainkan peran dominan dalam mengendalikan aliansi militer tersebut mengingat AS merupakan negara yang memiliki kapabilitas militer dan ekonomi paling tinggi dibandingkan negara-negara anggota lainnya. Sehingga NATO kemudian sering disebut sebagai alat politik AS (Heywood, 2014).

Sejak berakhirnya Perang Dingin, NATO mulai melakukan transformasi internal dari aliansi militer yang bersifat *collective defense* menuju *crisis management*. Dengan kata lain, NATO pasca Perang Dingin bukan lagi sekedar aliansi keamanan yang hanya berfokus untuk melindungi keamanan negara-negara anggotanya, tetapi telah bertransformasi menjadi suatu aliansi militer yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas keamanan dan perdamaian di Eropa dan seluruh dunia (Heywood, 2014). Transformasi tersebut diawali oleh upaya NATO melakukan perluasan keanggotaan ke negara-negara Eropa Timur, sebagaimana terlihat dari bergabungnya bekas negara satelit maupun yang sebelumnya tergabung dalam Uni Soviet seperti Republik Ceko, Polandia, Hungaria, Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Rumania, Slovakia, Slovenia, Albania, dan Kroasia. Sebagai aliansi keamanan terbesar, NATO tentunya mempunyai kapabilitas militer yang sangat besar. Berdasarkan data dari IISS tahun 2017, disebutkan bahwa NATO memiliki personel militer aktif sebanyak 3,18 juta pasukan. Selain itu, NATO juga mempunyai 9781 tank, 3896 pesawat tempur, dan 7467 misil nuklir (IISS, 2017).

Berbeda dengan NATO yang terdiri dari sekelompok negara, Rusia merupakan entitas negara tunggal yang telah lama eksis sejak abad ke-8 M. Dalam sejarahnya, Rusia sempat menyatu menjadi bagian utama dari Uni Soviet, sebelum kemudian kembali lagi menjadi negara yang mandiri pasca bubarnya Uni Soviet pada 1991. Sejak terpisah dari Uni Soviet, Rusia dihadapkan pada dua persoalan. Pertama ialah berbagai konflik politik dalam negeri yang secara tidak langsung berdampak pada menjamurnya masalah separatisme dalam negeri. Masalah

ini muncul karena belum tertatanya secara tegas hubungan antar organ kekuasaan dalam pemerintahan. Sementara itu persoalan kedua berkaitan dengan kebijakan Rusia, yang pada saat itu berada dibawah pimpinan Yeltsin, untuk tetap melanjutkan upaya menjalin hubungan baik negara-negara Barat sebagaimana pada masa Gorbachev. Hubungan baik yang dimaksud disini bukan hanya sekedar meningkatnya intensitas komunikasi dan kunjungan diplomatik, tetapi lebih jauh dari itu Rusia berupaya 'menyenangkan' negara-negara Barat dengan menerapkan sistem demokrasi yang sesuai dengan apa yang diterapkan oleh negara-negara Barat (Fachrudji, 2005).

Pemerintahan Boris Yeltsin sendiri berakhir pada Desember 1999. Vladimir Putin yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri segera dilantik sebagai Presiden sementara sampai kemudian ia terpilih secara permanen melalui pemilihan umum pada Mei 2000. Pada awal pemerintahannya Putin dihadapkan pada persoalan yang belum terselesaikan selama pemerintahan Yeltsin yang meliputi masalah perekonomian, krisis politik, dan upaya separatisme beberapa negara bagian, seperti Chechnya, Ingussetia, hingga Dagestan. Dalam mengatasi masalah perekonomian, Putin tetap melanjutkan kebijakan reformasi dan ekonomi pasar bebas yang telah dijalankan sejak masa Yeltsin, dan juga Gorbachev. Meskipun demikian, berbeda pada saat Yeltsin berkuasa, pada masa pemerintahannya Putin tidak lagi memberikan keleluasaan kepada para Oligarkh dalam memperluas bisnis mereka. Selain itu para oligarkh juga diharuskan untuk membayar dan melunasi utang pajak mereka yang tertunggak selama masa pemerintahan Yeltsin. Ketegasan Putin ini merupakan tindak lanjut pemerintahannya dalam menerapkan kebijakan nasionalisasi terhadap aset-aset bangsa, tertama perusahaan-perusahaan minyak. Kebijakan tersebut secara langsung berdampak pada peningkatan pendapatan negara (Fachrudji, 2005).

Keberhasilan Putin dalam menata politik dan pemerintahan dalam negerinya memberikan pengaruh pada politik luar negeri Rusia. Sebagaimana pada masa Yeltsin, politik luar negeri Rusia pada masa pemerintahan Putin juga bergantung pada apa yang dijalankan di dalam

negeri. Jika dibandingkan masa Yeltsin, politik luar negeri Rusia di bawah Putin semakin menemukan bentuknya, tidak sekedar 'menyenangkan' negara-negara Barat seperti pada masa awal Rusia pasca-Soviet di permulaan 1990-an ketika Yeltsin mulai berkuasa. Pada masa pemerintahan Putin, dengan ditunjang oleh kondisi dalam negeri yang lebih kondusif, Rusia dapat menentukan sendiri misi dan visi politik luar negerinya, yang bebas dari keterlibatan pihak luar. Oleh karena itu, sejak masa pemerintahannya, dalam konteks politik luar negeri, Rusia memiliki visi untuk menjadi kekuatan baru dalam politik internasional. Dalam mewujudkan visi politik luar negeri Rusia yang ia tetapkan, Putin menekankan dua karakteristik politik luar negeri yang harus dijalankan oleh Rusia, yaitu non-isolasionis, dan bebas dari intervensi kepentingan asing. Disamping itu kebijakan luar negeri Rusia juga tidak bisa dilepaskan dari tujuan negara tersebut dalam menciptakan kondisi keamanan maupun stabilitas politik dan ekonomi (Muhammad, Hussein, & Sahide, 2019). Pada perkembangannya tujuan dan strategi jangka panjang Rusia untuk kembali menjadi negara super power, terangkum dalam RNSS yang dirilis pertama kali pada 2009 dan diperbarui pada 2015.

Sebagai negara yang sering disebut sebagai pewaris Uni Soviet, Rusia tentunya mempunyai kapabilitas militer yang cukup besar. Berdasarkan data dari IISS tahun 2017, disebutkan bahwa Rusia memiliki personel militer aktif sebanyak 831 ribu pasukan. Selain itu, Rusia juga mempunyai 2700 tank, 1046 pesawat tempur, dan 7000 misil nuklir (IISS, 2017). Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan NATO, secara keseluruhan kapabilitas militer Rusia masih berada dibawah aliansi militer yang dipimpin oleh AS tersebut, sebagaimana terlihat pada tabel 2 dibawah.

Tabel 2: PERBANDINGAN KAPABILITAS MILITER NATO DAN RUSIA

	Personel Militer	Tank Tempur	Pesawat Tempur	Persenjataan Nuklir
NATO	3.186.642	9781	3896	7467
Rusia	831.000	2700	1046	7000

Sumber: IISS, The Military Balance, 2017

Besarnya kapabilitas NATO dibandingkan dengan Rusia tentunya tidak bisa dilepaskan dari fakta bahwa NATO merupakan aliansi militer yang terdiri dari sekelompok negara. Berangkat dari kondisi tersebut, NATO tetap konsisten dalam menjalankan berbagai manuver militer di Estonia, Latvia, Lithuania, dan Polandia sejak 2017 sekalipun berbagai tindakan yang dilakukan oleh NATO mendapatkan respon dari Rusia. Keunggulan kapabilitas militer NATO membuat aliansi militer yang dipimpin oleh AS tersebut memiliki keyakinan bahwa wilayah Kaliningrad akan dapat mereka rebut. Hal ini tampak dari pernyataan Jeffrey Harrigian, salah seorang Jenderal Angkatan Udara AS pada 2017, yang menyampaikan bahwa Kaliningrad akan dapat dikuasai jika rencana operasi manuver pesawat tempur AS dan negara-negara NATO berjalan dengan baik (Muhaimin, 2019). Optimisme dari salah seorang perwira militer AS tersebut merupakan wujud dari anggapan akan kapabilitas militer NATO yang lebih superior dari Rusia, dimana hal itu menjadi salah satu faktor yang membuat NATO menjalankan strategi konfrontatif terhadap Rusia melalui berbagai manuver militer di Estonia, Latvia, Lithuania, dan Polandia.

V. KESIMPULAN

Berbagai manuver militer NATO di Estonia, Latvia, Lithuania, dan Polandia dalam bentuk penempatan pasukan dan pengadaan latihan militer bersama merupakan bentuk dari strategi konfrontatif NATO yang ditujukan pada Rusia. Apa yang dilakukan oleh NATO ini tentunya memicu kemungkinan besar akan adanya konflik militer langsung dengan Rusia, mengingat Rusia pada perkembangannya turut memberikan respon dalam bentuk peningkatan pasukan militer dan penempatan rudal balistik di wilayah Kaliningrad yang berbatasan langsung dengan Polandia dan Lithuania. Berdasarkan teori strategi politik luar negeri yang dirumuskan oleh Lovell, pilihan strategi konfrontatif yang diambil NATO didorong oleh dua faktor. Pertama ialah persepsi NATO yang melihat Rusia sebagai ancaman, sebagaimana terlihat dari statement resmi NATO pada beberapa poin

yang terdapat pada dalam *Press Release Warsaw Summit*. Adapun faktor kedua ialah adanya keyakinan NATO mengenai keunggulannya atas Rusia dalam hal kapabilitas militer. Sebagai aliansi militer terbesar pasca Perang Dingin, kapabilitas militer NATO tentunya lebih besar dari Rusia yang baru mengalami kebangkitan kembali dibawah pemerintahan Vladimir Putin. Keunggulan NATO inilah yang kemudian menjadi dasar optimisme NATO untuk menaklukkan Kaliningrad melalui latihan militer bersama di Polandia dan negara-negara Baltik.

REFERENSI

- Bakry, U. S. (2016). *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Batchelor, T. (2017). *The map that shows how many Nato troops are deployed along Russia's border*. The Independent, February, 5.
- Bugayova, N. (2019). How We Got Here With Russia: The Kremlin's Worldview (pp. 18-20, Rep.). *Institute for the Study of War*. doi:10.2307/resrep19569.8.
- Challis, B. (2020). Belarus beyond 2020: Implications for Russia and the West (pp. 3-6, Rep.). *European Leadership Network*. doi:10.2307/resrep25716.4.
- Fachrudji, A. (2005). *Rusia Baru Menuju Demokrasi*. Jakarta: Buku Obor.
- Gower, J. (2018). Nuclear Signalling Between NATO and Russia. *European Leadership Network*. doi:10.2307/resrep22136.
- Havlicek, P. (2016). *NATO-Russia Relations 2010-16: from Cooperation to Deterrence*. University of Glasgow.
- Heywood, A. (2014). *Global Politics*. Macmillan International Higher Education.
- Institute of International Security Studies. (2017). *The Military Balance 2017*. <https://www.iiss.org/publications/the-military-balance/the-military-balance-2017-wall-chart>.
- Jackson, R. & Sorensen, G. (2005). *Pengantar Hubungan Internasional* (Terj: Amat Asnawi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Klein, M., & Major, C. (2015). *Perspectives for NATO-Russia relations: forms of confrontation dominate-but dialogue not excluded*. SWP Berlin.
- Kulesa, L. (2018). (Rep.). *Envisioning a Russia-NATO Conflict: Implications for Deterrence Stability*. *European Leadership Network*. Retrieved January 17, 2021, from <http://www.jstor.org.ezproxy.ugm.ac.id/stable/resrep17437>.
- Lovell, J. P. (1970). *Foreign Policy in Perspective: Strategy, Adaptation, Decision Making*. Holt, Rinehart and Winston.
- Mas'ood, M. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- Mayhugh, T. (2017). *NATO Conclude Saber Strike 17 Exercise*. <https://dod.defense.gov/News/Article/Article/1229124/us-nato-conclude-saber-strike-17-exercise/>.
- Miner, L. (2018). *NATO exercise; 50.000 personnel take part in Exercise Trident Juncture 2018*. <https://www.euronews.com/2018/10/17/nato-exercise-50-000-personnel-take-part-in-exercise-trident-juncture-2018>.
- Muhaimin. (2019). *Pentagon Hendak Rontokkan Sistem Pertahanan Kaliningrad*. <https://international.sindonews.com/berita/1441717/41/pentagon-hendak-rontokkan-sistem-pertahanan-kaliningrad-ini-reaksi-rusia>.
- Muhammad, A., Hussin, M.H., & Sahide, A. (2019). *Kebangkitan Kembali Great Power: Politik Luar Negeri Rusia Era Presiden Vladimir Putin*. Yogyakarta: MIHI UMY.
- Nasirov, E., Iskandarov, K., & Sadiyev, S. (2017). The South Caucasus: A Playground Between NATO and Russia? *Connections*, 16(3), 47-56. doi:10.2307/26867919.
- NATO. (2016) *Warsaw Summit Communiqué*, diakses dalam https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133169.htm.
- NATO. (2020). *Operation and Missions : past and present*, diakses dalam https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_52060.htm.
- Oliker, O. (2016). *Unpacking Russia's New National Security Strategy*. *Center for Strategic and International Studies*, 7.
- Pradana, H. A. (2017). *Rasionalitas Rusia-NATO Dalam Perencanaan Kerjasama Rudal Tahun 2010. Prosiding SENASPRO UMM 2017*.
- Rehle, M. (2017). *450 German Troop head for NATO Deployment in Lithuania*. <https://www.rt.com/news/374410-germany-nato-troops-lithuania/>.

- Rogers, J. (2019). *Brit tank Join 9.000 NATO Troop indramatic show of force to ward off Putin in Estonia*.
<https://www.thesun.co.uk/news/9029001/army-estonia-spring-storm-nato-exercise-russia/> .
- Samuel Osborne (2017). *German dan Belgian NATO Troops Arrive in Lithuania amid Growing Russia Security Fears*.
<https://www.independent.co.uk/news/world/europe/nato-germany-belgian-troops-soldiers-lithuania-russia-putin-border-security-fears-a7545831.html>.
- Silalahi, U. (2006). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Spark, L. S. (2017). *Poland Welcomes Thousand od US Troops in NATO Show of Force*. <https://edition-m.cnn.com/2017/01/14/europe/poland-us-troops-nato-welcome/index.html?r=https%3A%2F%2Fwww.google.co.id%2F>.
- Sprenger, S. (2017). *NATO Foots Bill for Massive US Combat Depot in Poland*.
<https://www.defensenews.com/global/europe/2019/03/28/nato-foots-bill-for-massive-us-combat-depot-in-poland/>.
- The Russian Federation's National Security Strategy. (2015). *Russian National Security Strategy*.
<http://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/Internacional/2016/Russian-National-Security-Strategy-31Dec2015.pdf>.
- Todd, Z. (2017). *Canadian Troops deploy to Latvia for NATO Defense Mission*.
<https://www.cbc.ca/news/canada/edmonton/edmonton-soldiers-deploy-latvia-nato-military-russia-1.4154973>.
- Wolff, A. (2015). The future of NATO enlargement after the Ukraine crisis. *International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-)*, 91(5), 1103-1121. Retrieved January 17, 2021, from <http://www.jstor.org.ezproxy.ugm.ac.id/stable/24539021>.
- Zyga, I. (2012). *NATO-Russia Relations and Missile Defense: "Sticking Point" or "Game Changer"?*, *Carnegie Moscow Center Working Paper*.